



REPUBLIK INDONESIA

**PERJANJIAN
ANTARA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
REPUBLIK ISLAM IRAN
TENTANG
BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak");

Didasari oleh hubungan yang baik antara kedua negara;

Berkeinginan untuk meningkatkan kerja sama yang erat dalam bidang penyidikan, penuntutan dan persidangan, termasuk pula penelusuran, pemblokiran, penyitaan, atau perampasan hasil-hasil dan alat untuk melakukan tindak pidana, melalui bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana;

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

**PASAL 1
RUANG LINGKUP BANTUAN**

1. Para Pihak harus, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dan hukum nasionalnya, atas dasar saling menghormati kedaulatan, kesetaraan, dan keuntungan bersama, saling memberikan seluas-luasnya bantuan timbal balik dalam masalah pidana.
2. Untuk tujuan Perjanjian ini, bantuan timbal balik dalam masalah pidana berarti setiap bantuan yang diberikan oleh Pihak Diminta berkaitan dengan penyidikan, penuntutan, persidangan, atau proses hukum lainnya yang

berhubungan dengan tindak pidana, yang pada saat permintaan bantuan diajukan, berada di dalam yurisdiksi Pihak Peminta.

3. Bantuan timbal balik dapat terdiri atas:
 - a. pencarian dan pengidentifikasian orang dan barang;
 - b. pemeriksaan benda dan tempat;
 - c. permintaan bantuan ahli;
 - d. penyampaian dokumen, termasuk dokumen untuk mengupayakan kehadiran orang;
 - e. penyediaan informasi, dokumen, catatan, dan barang bukti;
 - f. penyediaan dokumen asli atau salinan resmi dari dokumen yang berkaitan, catatan, dan barang bukti;
 - g. penyediaan benda, termasuk peminjaman barang bukti;
 - h. pengakuan dan pelaksanaan keputusan pengadilan;
 - i. penggeledahan dan penyitaan;
 - j. pengambilan alat bukti dan pemerolehan keterangan;
 - k. pengupayaan agar orang yang ditahan dapat memberikan kesaksian atau membantu penyidikan, penuntutan, persidangan, atau tindakan hukum lainnya di Pihak Peminta;
 - l. pengupayaan kehadiran saksi atau pengupayaan bantuan seseorang dalam penyidikan,
 - m. pengupayaan untuk menelusuri, memblokir, membekukan, menyita, merampas, serta mengembalikan hasil dan/atau alat untuk melakukan tindak pidana; dan
 - n. setiap bentuk bantuan lain yang tidak dilarang berdasarkan hukum Pihak Diminta.
4. Perjanjian ini berlaku pula untuk setiap permintaan bantuan timbal balik yang terkait dengan perbuatan ataupun pembiaran tindak pidana yang dilakukan sebelum berlakunya Perjanjian ini.
5. Bantuan juga dapat diberikan dalam kaitan dengan penyidikan, penuntutan, persidangan, atau proses hukum terkait tindak pidana perpajakan, bea cukai, dan pengawasan valuta asing atau setiap masalah pendapatan lainnya.
6. Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tidak boleh memberikan hak apapun kepada perseorangan untuk memperoleh, menolak, atau mengesampingkan bukti, atau menghalangi pelaksanaan permintaan bantuan dimaksud.

PASAL 2

PENGECEUALIAN

1. Tanpa mengesampingkan pembentukan dari perjanjian atau pengaturan tertentu, Perjanjian ini tidak berlaku terhadap:
 - a. penangkapan atau penahanan seseorang untuk tujuan ekstradisi atas orang tersebut;
 - b. pemindahan terpidana untuk menjalani hukuman; dan
 - c. pemindahan proses hukum dalam masalah pidana.
2. Tidak ada sesuatupun dalam Perjanjian ini memberikan hak kepada salah satu Pihak untuk menerapkan yurisdiksi dan pelaksanaan fungsi di wilayah Pihak lain yang dimilikinya secara eksklusif untuk pihak berwenang dari Pihak lain dalam hukum nasionalnya.

PASAL 3

OTORITAS PUSAT DAN TATA CARA BERKOMUNIKASI

1. Untuk tujuan Perjanjian ini, Otoritas Pusat yang ditunjuk oleh Para Pihak saling berkomunikasi satu dengan yang lain mengenai hal-hal yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian ini melalui saluran diplomatik.
2. Otoritas Pusat yang terdapat dalam Ayat 1 dari Pasal ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian Kehakiman Republik Islam Iran.
3. Apabila salah satu Pihak mengganti Otoritas Pusat yang ditunjuk, Pihak tersebut memberitahukan kepada Pihak lainnya atas perubahan tersebut melalui saluran diplomatik

PASAL 4

ISI PERMINTAAN

1. Dalam setiap perkara, permintaan bantuan harus mencantumkan:
 - a. nama pihak yang berwenang melakukan penyidikan, penuntutan atau proses hukum lainnya yang berkaitan dengan permintaan tersebut;
 - b. tujuan dari permintaan dan jenis bantuan yang dimintakan;
 - c. uraian tentang sifat masalah pidana dan status terkini, serta pernyataan yang menjelaskan rangkuman fakta-fakta dan salinan ketentuan hukum

yang dapat dikenakan, termasuk ancaman hukuman maksimal terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan permintaan tersebut;

- d. tingkat kerahasiaan yang diperlukan beserta alasannya;
- e. batas waktu yang ditentukan untuk memenuhi permintaan tersebut; dan
- f. informasi atau tindakan lain yang mungkin diperlukan berdasarkan hukum nasional Pihak Diminta atau hal lain yang diperlukan untuk melaksanakan permintaan tersebut.

2. Dalam hal-hal berikut, permintaan bantuan harus memuat:

- a. dalam hal permintaan untuk pengambilan barang bukti, penggeledahan dan penyitaan, atau penelusuran, pembekuan, penyitaan dan perampasan hasil dan/atau alat untuk melakukan tindak pidana, pernyataan yang memuat informasi atau petunjuk lainnya yang menjelaskan keberadaan hasil dan/atau alat untuk melakukan tindak pidana di yurisdiksi Pihak Diminta; dan
- b. dalam hal menghadirkan orang yang ditahan, keterangan tentang orang atau jabatan orang yang akan bertanggung jawab untuk menahan selama proses pemindahan, lokasi tempat tahanan akan dipindahkan dan kemungkinan tanggal kembalinya tahanan dimaksud.

3. Apabila diperlukan, dan dimungkinkan, permintaan bantuan harus memuat pula:

- a. identitas, kewarganegaraan, dan lokasi orang yang menjadi pokok penyidikan, penuntutan atau persidangan pidana;
- b. rincian prosedur khusus atau persyaratan tertentu yang dikehendaki oleh Pihak Peminta untuk dipenuhi beserta alasannya;
- c. dalam hal permintaan untuk mengambil bukti dari seseorang, indikasi tentang apakah diperlukan keterangan di bawah sumpah atau pernyataan yang diakui kebenarannya, dan uraian tentang hal-hal pokok yang terkait dengan bukti atau pernyataan yang diminta; dan
- d. penjelasan mengenai dokumen, catatan, atau barang bukti yang dimintakan.

4. Jika Pihak Diminta menganggap bahwa informasi yang diberikan tidak mencakupi untuk melaksanakan permintaan tersebut, Negara Diminta dapat meminta informasi tambahan agar permintaan dapat dilaksanakan.

5. Permintaan bantuan harus disampaikan secara tertulis. Namun, dalam keadaan mendesak atau apabila diperkenankan oleh Pihak Diminta, permintaan dapat disampaikan dalam bentuk lain, tetapi kemudian harus segera ditegaskan kembali secara tertulis.
6. Suatu permintaan, setiap dokumen pendukung, dan komunikasi yang dilakukan sesuai dengan Perjanjian ini, harus disampaikan dalam bahasa Pihak Peminta disertai oleh terjemahan dalam bahasa Pihak Diminta atau bahasa Inggris.

PASAL 5

PENOLAKAN BANTUAN

1. Bantuan tidak dikabulkan apabila:
 - a. menurut Pihak Diminta, pelaksanaan permintaan dapat mengganggu kedaulatan, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan umum;
 - b. permintaan terkait dengan tindak pidana yang pada akhirnya terdakwa dinyatakan tidak bersalah atau diampuni;
 - c. permintaan terkait dengan penuntutan atas seseorang sehubungan dengan tindak pidana yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.
 - d. Pihak Diminta memiliki alasan kuat untuk meyakini bahwa permintaan bantuan timbal balik diajukan dengan tujuan untuk menuntut seseorang berdasarkan ras, agama, kewarganegaraan, suku, pandangan politik, atau orang tersebut dapat, berdasarkan alasan-alasan dimaksud, diperlakukan tidak adil dalam proses peradilannya;
 - e. Pihak Peminta tidak dapat memberikan jaminan bahwa bantuan yang dimintakan tidak dapat dipergunakan untuk tujuan selain yang tercantum dalam permintaan tanpa persetujuan sebelumnya dari Pihak Diminta;
 - f. Pihak Peminta tidak dapat memberikan jaminan untuk mengembalikan bukti-bukti yang telah diperoleh berdasarkan permintaan bantuan hukum sesuai Perjanjian ini;
 - g. permintaan berhubungan dengan penyidikan, penuntutan atau pelaksanaan hukuman terhadap seseorang atas perbuatan atau pembiaran, jika hal itu terjadi di Pihak Diminta dan bukan merupakan tindak pidana berdasarkan undang-undang Pihak Diminta kecuali Pihak

Diminta dapat memberikan bantuan dengan tanpa kriminalitas ganda apabila dibenarkan oleh hukum nasionalnya;

- h. permintaan berhubungan dengan penuntutan atas seseorang untuk tindak pidana yang orang tersebut tidak dapat dituntut dengan alasan kedaluwarsa apabila tindak pidana dilakukan dalam yurisdiksi Pihak Diminta;
 - i. permintaan berkaitan dengan tindak pidana yang hanya diatur dalam hukum militer, dan bukan merupakan tindak pidana dalam hukum pidana umum;
 - j. permintaan berkaitan dengan tindak pidana yang bersifat politik.
2. Menurut Perjanjian ini, tindak pidana berikut tidak termasuk sebagai tindak pidana yang bersifat politik:
- a. tindak pidana terhadap nyawa atau diri Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan atau keluarga inti mereka;
 - b. tindak pidana berdasarkan konvensi internasional dalam hal Para Pihak memiliki kewajiban dengan menjadi negara pihak dalam konvensi tersebut, untuk memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana;
 - c. tindak pidana terkait terorisme;
 - d. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan setiap tindak pidana sebagaimana tersebut di atas atau turut serta dalam pembantuan kepada seseorang yang melakukan atau mencoba untuk melakukan tindak pidana tersebut;
3. Permintaan bantuan dapat tidak dikabulkan apabila:
- a. pemberian bantuan dimaksud dapat, atau mungkin dapat mengancam keselamatan siapapun, walaupun orang tersebut berada di dalam atau di luar wilayah Pihak Diminta;
 - b. permintaan berkaitan dengan penyidikan, penuntutan ataupun penjatuhan hukuman atas seseorang yang berkenaan dengan suatu alasan yang dapat digunakan sebagai dasar penolakan yang diatur dalam hukum nasional Pihak Diminta.
4. Bantuan tidak dapat ditolak hanya dengan alasan kerahasiaan bank atau lembaga keuangan sejenis atau tindak pidana tersebut juga dinilai terkait dengan masalah fiskal.

PASAL 6
PELAKSANAAN PERMOHONAN

1. Permohonan untuk bantuan harus dilaksanakan secara tepat sesuai dengan hukum Pihak Diminta dan dengan cara yang ditentukan oleh Pihak Peminta.
2. Pihak Diminta berdasarkan permintaan harus memberitahukan waktu dan tempat dari pelaksanaan permohonan bantuan kepada Pihak Peminta.
3. Bantuan dapat ditunda oleh Pihak Diminta apabila pelaksanaan dari permintaan dapat mengganggu penyidikan, penuntutan, atau persidangan yang sedang berjalan di Pihak Diminta.
4. Pihak Diminta harus memberitahukan kepada Pihak Peminta mengenai keputusan untuk tidak memenuhi seluruh atau sebagian dari permohonan bantuan atau penundaan pelaksanaan, dan harus memberikan alasan dari keputusan itu.
5. Sebelum menolak permintaan atau sebelum menunda pelaksanaan suatu permintaan, Pihak Diminta harus mempertimbangkan apakah bantuan dapat diberikan berdasarkan persyaratan yang dianggap perlu oleh Pihak Diminta. Apabila Pihak Peminta menerima bantuan bersyarat tersebut, maka syarat tersebut harus dipatuhi.

PASAL 7
PENYAMPAIAN DOKUMEN

1. Pihak Diminta harus memenuhi permintaan penyampaian dokumen yang dikirimkan kepadanya untuk tujuan penyampaian dokumen tersebut oleh pihak Peminta.
2. Pihak Peminta harus mengirimkan permintaan untuk penyampaian dokumen mengenai tanggapan atau kehadiran di Pihak Peminta dalam waktu yang cukup, sebelum tanggapan atau kehadiran yang telah dijadwalkan.
3. Pihak Diminta harus menyampaikan kepada Pihak Peminta tanda terima penyampaian dokumen. Jika penyampaian dokumen tidak dapat dilaksanakan, Pihak Peminta harus diberitahukan alasan-alasannya.
4. Dalam situasi apabila alamat yang dituju tidak lengkap atau tepat dan/atau orang dituju tidak diketahui di alamat dimaksud, Pihak Diminta harus berupaya

sebaik mungkin untuk mendapatkan alamat penerima, sesuai dengan hukum yang berlaku.

5. Dalam situasi dokumen tidak dibuat dalam bahasa Pihak Diminta atau tidak disertai terjemahan resmi, dokumen tetap disampaikan jika penerima menyetujui untuk menerima dokumen tersebut.

PASAL 8

PENYEDIAAN INFORMASI, DOKUMEN, CATATAN, DAN BENDA

1. Pihak Diminta, berdasarkan permintaan, menyediakan kepada Pihak Peminta salinan dokumen atau catatan kementerian dan lembaga pemerintahan yang terbuka bagi umum.
2. Pihak Diminta dapat, berdasarkan permintaan, menyediakan kepada Pihak Peminta setiap informasi, dokumen, catatan, dan benda yang berada dalam penguasaan kementerian atau lembaga pemerintah, tetapi tidak terbuka bagi publik, sepanjang dimungkinkan dan sesuai dengan persyaratan yang sama sebagaimana hal-hal tersebut dapat tersedia untuk lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan.
3. Pihak Diminta dapat menyediakan salinan resmi dokumen atau catatan, kecuali Pihak Peminta secara jelas meminta yang asli.
4. Berdasarkan permintaan, dokumen, catatan atau benda asli yang telah diberikan kepada Pihak Peminta harus dikembalikan kepada Pihak Diminta sesegera mungkin.
5. Sepanjang tidak dilarang oleh hukum Pihak Diminta, dokumen, catatan, atau benda harus diberikan dalam suatu formulir atau dilengkapi dengan sertifikasi sebagaimana dikehendaki oleh Pihak Peminta agar dokumen, catatan atau benda dimaksud dapat dipergunakan sesuai hukum Pihak Peminta.

PASAL 9

PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN

1. Pihak Diminta, sepanjang dibenarkan oleh hukumnya, melaksanakan permintaan untuk pengeledahan dan penyitaan berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi di Pihak Diminta.

2. Penggeledahan dan penyitaan dilaksanakan oleh Pihak Diminta sepanjang dimungkinkan dan dengan persyaratan yang sama sesuai dengan hukumnya.
3. Pihak yang berwenang dari Pihak Diminta menyediakan informasi yang mungkin diperlukan tersebut oleh Pihak Peminta mengenai, tetapi tidak terbatas pada, setiap hasil penggeledahan, tempat, identitas, keadaan, integritas, dan kesinambungan penguasaan dokumen, catatan atau benda yang disita dan keadaan pada saat penyitaan, serta penyimpanan benda sitaan tersebut selanjutnya.

PASAL 10

PENGAMBILAN BARANG BUKTI

1. Pihak Diminta, sepanjang dibenarkan hukumnya dan berdasarkan permintaan, mengambil kesaksian dan mendapatkan dokumen tentang seseorang, termasuk orang yang ditahan, atau menyediakan barang bukti untuk dikirimkan kepada Pihak Peminta.
2. Seseorang yang daripadanya dimintai bukti di Pihak Diminta atas permintaan berdasarkan Pasal ini dapat menolak memberikan bukti, jika:
 - a. hukum Pihak Diminta memperbolehkan orang tersebut untuk menolak memberikan bukti pada situasi serupa dalam proses perkara pidana pada Pihak Diminta; atau
 - b. hukum Pihak Peminta memperbolehkan orang tersebut untuk menolak memberikan bukti pada situasi serupa dalam proses perkara pada Pihak Peminta.
3. Apabila seseorang pada Pihak Diminta menyatakan bahwa terdapat hak atau kewajiban untuk menolak memberikan bukti berdasarkan hukum Pihak Peminta, Pihak Peminta harus, berdasarkan permintaan, menyampaikan pemberitahuan resmi kepada Pihak Diminta mengenai adanya hak tersebut. Sebaliknya, dalam hal tidak adanya bukti, pemberitahuan resmi seperti itu dianggap sebagai bukti yang cukup untuk hal yang dinyatakan di dalamnya.

PASAL 11

KEHADIRAN PADA SAAT PELAKSANAAN PERMINTAAN

1. Sepanjang dibenarkan oleh hukum nasionalnya, Pihak Diminta dapat mengizinkan kehadiran dari perwakilan dari Pihak Diminta untuk menghadiri pelaksanaan pemenuhan permintaan sesuai dengan tata cara dari Pihak Diminta.
2. Sepanjang tidak dilarang oleh hukum dari Pihak Diminta, pejabat berwenang Pihak Peminta dapat menyampaikan berkas dan dokumen melalui perwakilan diplomatik atau konsulernya.

PASAL 12

KESEDIAAN TAHANAN UNTUK MEMBERIKAN BUKTI ATAU BANTUAN

1. Berdasarkan permintaan, seorang tahanan di Pihak Diminta dapat dipindahkan sementara ke Pihak Peminta untuk membantu proses penyidikan atau memberikan kesaksiannya, dengan syarat orang tersebut menyatakan kesediaannya. Pihak Peminta menyetujui untuk mematuhi setiap persyaratan yang ditentukan oleh Pihak Diminta.
2. Pihak Diminta memindahkan seorang tahanan ke Pihak Peminta hanya apabila:
 - a. Orang tersebut secara sukarela menyetujui pemindahannya; dan
 - b. Pihak Peminta menyetujui untuk memenuhi ketentuan yang ditentukan oleh Pihak Diminta terkait dengan penahanan atau keamanan orang yang dipindahkan tersebut.
3. Saat orang yang dipindahkan diperlukan untuk tetap berada dalam penahanan sesuai dengan hukum Pihak Diminta, Pihak Peminta akan terus menempatkan orang tersebut dalam tahanan dan orang tersebut dikembalikan pada saat selesainya pelaksanaan permintaan.
4. Saat masa hukuman yang dijatuhkan telah berakhir, atau saat Pihak Diminta memberitahukan kepada Pihak Peminta bahwa orang yang dipindahkan tidak lagi disyaratkan untuk ditahan, orang tersebut harus dibebaskan dan diperlakukan sebagai orang yang berada di Pihak Peminta sesuai dengan permintaan untuk menghadirkan orang tersebut.

PASAL 13

PEMBERIAN BUKTI ATAU BANTUAN PENYIDIKAN DI PIHAK PEMINTA

Berdasarkan permintaan Pihak Peminta, Pihak Diminta mengundang orang, berdasarkan kesediaannya yang dinyatakan sebelumnya, untuk membantu penyidikan atau hadir sebagai saksi dalam persidangan di Pihak Peminta. Orang tersebut harus diberitahu mengenai perlindungan, fasilitas, dan tunjangan yang akan diberikan.

PASAL 14

TINDAKAN JAMINAN KESELAMATAN

1. Sesuai dengan Pasal 12 dan 13 Perjanjian ini, seseorang yang berada di Pihak Peminta untuk memenuhi suatu permintaan tidak boleh dituntut, ditahan, atau dikenakan pembatasan kemerdekaannya di Pihak Peminta atas setiap perbuatan atau pembiaran yang terjadi sebelum keberangkatan orang tersebut dari Pihak Diminta, orang tersebut juga tidak boleh diwajibkan untuk memberikan bukti dalam setiap proses hukum selain dari proses hukum yang berkaitan dengan permintaan.
2. Ayat 1 dari Pasal ini tidak berlaku lagi jika seseorang, yang bebas untuk pergi meninggalkan Pihak Peminta, tidak meninggalkan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah pemberitahuan resmi bahwa kehadiran orang tersebut tidak diperlukan lagi atau, setelah meninggalkan, kembali secara sukarela.
3. Setiap orang yang memberikan persetujuan untuk memberikan bukti berdasarkan Pasal 12 dan 13 Perjanjian ini tidak boleh dituntut atas dasar kesaksiannya, kecuali untuk sumpah palsu atau penghinaan terhadap pengadilan.
4. Setiap orang yang tidak memberikan persetujuan atau tidak dapat hadir di Pihak Peminta tidak dapat dikenakan upaya paksa apapun di Pihak Diminta.

PASAL 15

HASIL DAN ALAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA

1. Untuk tujuan Perjanjian ini, "hasil tindak pidana" adalah barang apapun yang berasal dari atau diperoleh, secara langsung maupun tidak langsung, melalui perbuatan pidana; dan "alat untuk melakukan tindak pidana" adalah barang

apapun yang digunakan dan bertujuan untuk digunakan dalam perbuatan pidana, atau nilai yang setara dengan barang tersebut.

2. Pihak Diminta, berdasarkan permintaan, berusaha untuk memastikan apakah terdapat hasil dan/atau alat untuk melakukan tindak pidana yang berada dalam yurisdiksinya dan memberi tahu Pihak Peminta mengenai hasil penelusuran. Pihak Peminta harus pula memberikan informasi yang diperlukan atau bukti lain apapun yang menunjukkan keberadaan hasil dan/atau alat untuk melakukan tindak pidana tersebut di yurisdiksi Pihak Diminta.
3. Dalam hal, berdasarkan Ayat 2 Pasal ini, hasil dan/atau alat untuk melakukan tindak pidana yang diduga tersebut ditemukan, Pihak Diminta harus mengambil langkah yang dibenarkan oleh hukumnya untuk menggeledah, membekukan, memblokir, dan menyita hasil dan/atau alat untuk melakukan tindak pidana yang dicurigai tersebut, menunggu keputusan akhir mengenai hasil dan/atau alat untuk melakukan tindak pidana tersebut oleh pengadilan Pihak Peminta.
4. Pihak Diminta yang menguasai hasil dan/atau alat untuk melakukan tindak pidana yang dirampas atau disita, untuk melaksanakan putusan Pengadilan Pihak Peminta mengambil tindakan yang diperlukan terhadap hasil dan/atau alat untuk melakukan tindak pidana tersebut berdasarkan hukumnya. Sepanjang dibenarkan oleh hukumnya, Pihak Diminta menyerahkan hasil dan/atau alat untuk melakukan tindak pidana yang telah dirampas atau disita tersebut kepada Pihak Peminta.
5. Dalam menerapkan Pasal ini, hak pihak ketiga yang beriktikad baik harus dihormati berdasarkan hukum Pihak Diminta. Apabila terdapat gugatan dari pihak ketiga, Pihak Diminta harus mewakili kepentingan Pihak Peminta untuk berupaya mempertahankan hasil dan/atau alat untuk melakukan tindak pidana hingga adanya suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan yang berwenang di Pihak Peminta.

PASAL 16

TRANSIT

1. Sepanjang diperbolehkan oleh hukum nasionalnya, transit seseorang yang akan diekstradisi dari suatu negara ketiga ke salah satu Pihak melalui wilayah

Pihak lainnya akan diizinkan berdasarkan permintaan yang disampaikan melalui saluran yang diatur dalam Pasal 3 Perjanjian ini. Izin transit tidak diperlukan dalam penggunaan transportasi udara dan tidak ada pendaratan yang dijadwalkan di wilayah Pihak yang digunakan sebagai tempat transit.

2. Apabila terjadi pendaratan tidak terjadwal di wilayah Pihak tersebut, Pihak tersebut dapat mensyaratkan Pihak lainnya untuk melengkapi permintaan transit sebagaimana ditetapkan pada Ayat 1 Pasal ini. Pihak tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasionalnya, dapat menahan orang yang akan diekstradisi tersebut untuk jangka waktu 72 (tujuh puluh dua) jam sambil menunggu permintaan transit.

PASAL 17

KERAHASIAAN

1. Pihak Diminta memastikan untuk:
 - a. menjaga kerahasiaan informasi atau bukti yang diberikan atau sumber informasi tersebut sesuai dengan permintaan bantuan;
 - b. menjaga kerahasiaan isi, dokumen pendukung dan setiap tindakan yang diambil sesuai dengan permintaan bantuan; dan
 - c. melindungi informasi atau bukti dari kehilangan, akses tanpa ijin, pengubahan, pembocoran, atau penyalahgunaan.
2. Apabila permintaan sesuai dengan ketentuan Ayat 1 dari Pasal ini tidak dapat dilaksanakan tanpa melanggar persyaratan kerahasiaan, Pihak Diminta harus memberi tahu Pihak Peminta sebelum pelaksanaan permintaan dan Pihak Peminta harus menentukan apakah permintaan tersebut tidak lagi perlu dilaksanakan.

PASAL 18

BATASAN PENGGUNAAN

Pihak Peminta menjamin untuk tidak membuka atau menggunakan informasi atau bukti yang diberikan untuk tujuan selain dari yang dinyatakan dalam permintaan tersebut, tanpa persetujuan sebelumnya dari Pihak Diminta.

PASAL 19

PENGESAHAN

1. Dokumen, catatan, atau benda yang dikirim melalui saluran sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perjanjian ini tidak memerlukan bentuk pengesahan apapun, kecuali ditentukan dalam Pasal 8 (3) Perjanjian ini.
2. Apabila, dalam hal tertentu, Pihak Diminta meminta dokumen atau bahan untuk disahkan, dokumen atau bahan tersebut disahkan dengan cara sebagaimana diatur dalam Ayat 3 Pasal ini.
3. Dokumen atau bahan yang disahkan untuk tujuan Perjanjian ini jika dimaksudkan untuk ditandatangani atau disahkan oleh pejabat atau pihak berwenang berdasarkan hukum Pihak Diminta dan distempel dengan stempel resmi dari pihak berwenang.

PASAL 20

BIAYA

1. Pihak Diminta menanggung biaya untuk memenuhi permintaan bantuan, kecuali biaya yang harus ditanggung oleh Pihak Peminta yaitu:
 - a. biaya yang berhubungan dengan pengangkutan orang ke atau dari wilayah Pihak Diminta atas permintaan dari Pihak Peminta berdasarkan permintaan menurut Pasal 12 dan 13 Perjanjian ini;
 - b. biaya dan upah tenaga ahli baik di Pihak Diminta atau di Pihak Peminta;
 - c. biaya penerjemahan, penafsiran, dan pentranskripsian; dan
 - d. biaya yang berhubungan dengan pengambilan bukti dari Pihak Diminta ke Pihak Peminta melalui video, satelit, atau sarana teknologi lainnya.
2. Jika ternyata pelaksanaan permintaan tersebut membutuhkan biaya yang besar, Para Pihak harus berkonsultasi untuk menentukan dengan syarat dan dalam kondisi apa bantuan dapat diberikan.

PASAL 21

KEWAJIBAN INTERNASIONAL

Perjanjian ini tidak akan memengaruhi hak dan kewajiban Para Pihak mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana berdasarkan konvensi internasional atau pengaturan lainnya yang dalam hal ini mereka menjadi pihak.

PASAL 22

KONSULTASI

Para Pihak saling berkonsultasi, pada waktu yang disetujui bersama, untuk mendorong pelaksanaan Perjanjian ini dengan cara yang paling efektif. Kedua belah Pihak juga dapat menyepakati langkah praktis yang dipandang perlu untuk memfasilitasi pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 23

PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap sengketa yang timbul akibat penafsiran atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan dengan konsultasi antara Para Pihak.

PASAL 24

AMANDEMEN

Perjanjian ini dapat diubah setiap saat melalui kesepakatan tertulis Para Pihak. Amandemen dimaksud akan berlaku melalui prosedur yang sama dengan prosedur pemberlakuan Perjanjian ini.

PASAL 25

KETENTUAN AKHIR

1. Para Pihak harus memberitahukan satu sama lain mengenai selesainya persyaratan domestik masing-masing untuk pemberlakuan Perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal diterimanya pemberitahuan pemberlakuan yang paling akhir.
2. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini sewaktu-waktu dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik. Pengakhiran ini berlaku setelah 6 (enam) bulan sejak diterimanya pemberitahuan mengenai pengakhiran dimaksud. Pengakhiran Perjanjian ini tidak akan memengaruhi permintaan ekstradisi yang telah disampaikan sebelum pengakhiran Perjanjian ini.

Sebagai bukti, yang bertanda tangan di bawah ini, diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Perjanjian ini.

Perjanjian ini terdiri dari satu pembukaan dan 25 (dua puluh lima) Pasal yang dibuat di Tehran pada tanggal 14 bulan Desember tahun 2016, bertepatan dengan tanggal 24 bulan Azar tahun 1395 dalam Kalender Iran, dalam rangkap dua naskah asli, masing-masing berbahasa Indonesia, Persia, dan Inggris. Semua naskah adalah autentik. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK REPUBLIK INDONESIA

UNTUK REPUBLIK ISLAM IRAN

Signed

RETNO L. P. MARSUDI
MENTERI LUAR NEGERI

Signed

MOSTAFA POURMOHAMMADI
MENTERI KEHAKIMAN



REPUBLIK INDONESIA

معاهده
میان
جمهوری اندونزی
و
جمهوری اسلامی ایران
در زمینه
معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری

جمهوری اندونزی و جمهوری اسلامی ایران (که از این پس «طرفها» نامیده می‌شوند)؛

با مدنظر قرار دادن روابط دوستانه موجود میان دو کشور؛
با تمایل به توسعه همکاری‌ها تا حد ممکن برای یکدیگر در خصوص
تحقیق، تعقیب و رسیدگی به جرایم نظیر رندیابی، پیشگیری، مصادره
یا توقیف عواید حاصله و ابزار جرم از طریق معاضدت حقوقی متقابل
در امور کیفری؛
به شرح زیر توافق کرده‌اند:

ماده 1

محدوده معاضدت

1. طرفها طبق این معاهده و با رعایت قوانین داخلی خود و بر
مبنای احترام متقابل به حاکمیت، برابری و نفع متقابل، معاضدت
حقوقی متقابل در امور کیفری را تا حد ممکن برای یکدیگر فراهم
خواهند نمود.

2. از نظر این معاهده، معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری به
معنای معاضدت ارائه شده توسط طرف درخواست شونده در خصوص تحقیق،
تعقیب، رسیدگی قضایی یا سایر تشریفات رسیدگی مربوط به هر جرم
خواهد بود که در زمان درخواست معاضدت در صلاحیت دولت درخواست
کننده قرار می‌گیرد.

3. معاضدت حقوقی متقابل می‌تواند شامل موارد زیر شود:

الف) مکان‌یابی و شناسایی اشخاص و اشیاء؛

ب) بازرسی اشیاء و مکان‌ها؛

پ) درخواست مشاوره کارشناسی؛

ت) ابلاغ اسناد از جمله اسنادی که حضور اشخاص را درخواست می-

کند؛

ث) ارائه اطلاعات، اسناد، سوابق و اقلام ادله؛

ج) ارائه اصل یا نسخه‌های مصدق اسناد مربوطه، سوابق و اقلام

ادله؛

چ) ارائه اشیاء از جمله امانت دادن مستندات؛

ح) شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی؛

خ) جستجو و مصادره؛

د) اخذ ادله و اظهارات؛

ذ) مهیا ساختن اشخاص بازداشت شده جهت ارائه ادله یا مساعدت

در تحقیق، تعقیب، رسیدگی یا سایر تشریفات رسیدگی در قلمرو طرف

درخواست کننده؛

ر) تسهیل حضور شهود یا مساعدت به اشخاص در تحقیق؛

ز) اتخاذ اقداماتی به منظور ردیابی، پیشگیری، انسداد،

مصادره، توقیف و استرداد عواید و یا ابزارهای جرم؛ و

ر) هر شکل دیگری از معاضدت که به موجب قوانین طرف درخواست

شونده منع نشده باشد.

4. این معاهده همچنین در مورد درخواست‌های معاضدت حقوقی مربوط

به افعال یا ترک افعال پیش از لازم‌الاجرا شدن آن نیز اعمال می‌شود.

5. معاضدت همچنین می‌تواند در رابطه با تحقیق، تعقیب، رسیدگی

حقوقی یا سایر تشریفات رسیدگی به جرایم مربوط به مالیات، تعرفه

و حقوق و عوارض گمرکی و کنترل مبادلات ارزی یا هر موضوع دیگری که

مربوط به عواید باشد، انجام شود.

6. مفاد این معاهده هیچ حقی را برای هر شخص خصوصی مبنی بر

تحصیل، توقیف یا استثناء کردن هر دلیل یا ممانعت از اجرای هر

درخواست معاضدت ایجاد نمی‌نماید.

ماده 2

استثناء

1. این معاهده بدون خدشه وارد کردن به انعقاد ترتیبات یا معاهدات خاص، در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
(الف) بازداشت یا توقیف هر شخصی به منظور استرداد آن شخص؛
(ب) انتقال اشخاصی که در حبس به سر می‌برند جهت گذراندن حکم محکومیت؛ و
(پ) انتقال تشریفات رسیدگی در امور کیفری.
2. هیچ چیز در این معاهده یک طرف را محق نمی‌کند تا در قلمرو طرف دیگر اعمال صلاحیت نماید یا وظایفی را انجام دهد که به موجب قوانین داخلی آن طرف منحصراً در اختیار مقامات آن طرف است.

ماده 3

مراجع مرکزی و نحوه ارتباط

1. از نظر این معاهده، مراجع مرکزی تعیین شده توسط طرف‌ها برای موضوعاتی که در حیطه شمول این معاهده قرار دارند، با یکدیگر از مجاری دیپلماتیک ارتباط برقرار خواهند کرد.
2. مراجع مرکزی موضوع بند 1 این ماده وزارت دادگستری برای جمهوری اسلامی ایران و وزارت قانون و حقوق بشر برای جمهوری اندونزی خواهد بود.
3. چنانچه هر یک از طرف‌ها، مرجع مرکزی خود را تغییر دهد، باید طرف دیگر را از آن تغییر از مجاری دیپلماتیک آگاه کند.

ماده 4

محتوای درخواست

1. در کلیه موارد، درخواست معاضدت حقوقی حاوی موارد زیر خواهد بود:
(الف) نام مرجع صالح متولی تحقیق، تعقیب یا سایر تشریفات رسیدگی که درخواست مرتبط با آن است؛
(ب) هدف درخواست و ماهیت معاضدت درخواست شده؛

پ) توصیف ماهیت امر کیفری و وضعیت کنونی آن، اعلامیه‌ای مبین خلاصه وقایع مربوطه و نسخه‌ای از قوانین قابل اعمال از جمله حداکثر مجازات جرمی که درخواست به آن مربوط می‌شود؛

ت) درجه محرمانه بودن مورد نظر و دلایل آن؛

ث) هر محدوده زمانی که در خلال آن باید درخواست اجرا شود؛ و

ج) هر اطلاعات یا تعهد دیگری که ممکن است به موجب قوانین داخلی طرف درخواست‌شونده لازم باشد یا به هر نحو دیگری برای اجرای صحیح درخواست ضرورت داشته باشد.

2. در حالت‌های زیر درخواست معاضدت شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) در مورد درخواست اخذ ادله، جستجو و توقیف یا ردیابی، انسداد، مصادره و توقیف عواید حاصل از جرم و یا ابزار جرم، اعلامیه‌ای مبین اطلاعات یا هر زمینه‌ای که نشان دهد چنین عواید و یا ابزار جرمی در محدوده صلاحیت طرف درخواست شونده، وجود دارد؛ و ب) در مورد در دسترس قرار دادن اشخاص بازداشت شده، اشاره به شخص یا گروهی از اشخاصی که در طول دوره انتقال در حبس به سر خواهند برد، محلی که شخص بازداشت شده به آن انتقال می‌یابند و تاریخ احتمالی بازگشت آن شخص.

3. در صورت لزوم و چنانچه ممکن باشد، درخواست معاضدت شامل

موارد زیر خواهد بود:

الف) هویت، تابعیت و محل اقامت شخص (اشخاصی) که موضوع تحقیق، تعقیب یا سایر تشریفات رسیدگی است؛

ب) جزئیات هر روند یا الزام خاصی که طرف درخواست‌کننده تمایل به متابعت از آن را دارد و دلایل آن؛

پ) در مورد درخواست‌های اخذ ادله از یک شخص، اشاره به این که آیا اظهارات تایید شده یا مورد سوگند قرار گرفته ضرورت دارد یا ندارد، و توصیف موضوع دلیل یا اظهاری که مورد نظر است؛ و

ت) توصیف اسناد، سوابق، یا اقلام ادله که باید ارائه شود.

4. چنانچه طرف درخواست‌شونده تشخیص دهد که اطلاعات مورد نظر

جهت اجرا نمودن درخواست کافی نیست، می‌تواند جهت بررسی درخواست، اطلاعات تکمیلی را مطالبه نماید.

5. درخواست معاضدت به صورت مکتوب تنظیم خواهد شد. با این

وجود، در شرایط فوری یا در مواردی که توسط طرف درخواست‌شونده به نحو دیگری اجازه داده شده باشد، درخواست می‌تواند به شکل دیگری

تنظیم شود، اما فوری پس از آن باید به صورت مکتوب مورد تایید قرار گیرد.

6. یک درخواست، هرگونه مستندات مؤید آن و هر گونه مکاتبه انجام شده به موجب این معاهده به زبان طرف درخواست کننده همراه با ترجمه به زبان طرف درخواستشونده یا زبان انگلیسی، خواهد بود.

ماده 5

امتناع از معاضدت

1. درخواست معاضدت حقوقی در موارد زیر مورد موافقت قرار نخواهد گرفت:

(الف) به عقیده طرف درخواستشونده اجرای درخواست، حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا منافع عمومی آن طرف را مخدوش نماید؛
(ب) درخواست مربوط به جرمی باشد که در خصوص آن شخص متهم در نهایت تبرئه یا عفو شده باشد؛
(پ) درخواست مرتبط با تعقیب شخص در رابطه با جرمی باشد که محکومیت نهایی برای آن جرم سپری شده باشد؛
(ت) طرف درخواستشونده دلایلی مأمور برای این باور داشته باشد که درخواست معاضدت حقوقی دوجانبه به منظور تعقیب شخصی بر مبنای نژاد، مذهب، تابعیت، خاستگاه قومی، عقاید سیاسی وی صورت گرفته یا با شخص مزبور به سبب هر یک از این عوامل در تشریفات رسیدگی-های حقوقی، رفتار غیرعادلانه ای صورت گیرد؛
(ث) طرف درخواستکننده نتواند اطمینان دهد که معاضدت درخواست شده بدون رضایت قبلی طرف درخواست شونده برای مقاصد غیر از آنچه در درخواست بیان شده است، به کار نخواهد رفت؛
(ج) طرف درخواستکننده نتواند اطمینان دهد که ادله تحصیل شده به موجب درخواست معاضدت حقوقی به موجب این معاهده بازگردانده شوند؛

(چ) درخواست مربوط به تحقیق، تعقیب یا مجازات شخص در خصوص فعل یا ترک فعلی که اگر در قلمرو طرف درخواستشونده ارتکاب می‌یافت، جرمی علیه قوانین طرف درخواستشونده محسوب نمی‌شد، مگر آن که طرف درخواستشونده بتواند در صورت فقدان جرم‌انگاری دوگانه و در صورت مجاز شمرده شدن به موجب قوانین داخلی خود، معاضدت فراهم نماید؛

ج) درخواست مرتبط با تعقیب شخص برای جرمی باشد که در خصوص آن، چنانچه جرم در محدوده صلاحیت طرف درخواست‌شونده ارتکاب یافته باشد، شخص مزبور را به سبب مرور زمان، مورد تعقیب قرار داد.

خ) جرمی که برای آن معاضدت درخواست شده جرم نظامی باشد که طبق حقوق کیفری عادی، جرم محسوب نمی‌شود؛

د) درخواست مرتبط با جرم دارای ماهیت سیاسی باشد.

2. از نظر این معاهده، موارد زیر جرم دارای ماهیت سیاسی محسوب نخواهد شد:

الف) جرم علیه حیات یا شخص رئیس حکومت یا رئیس دولت یا اعضای درجه اول خانواده آن‌ها؛

ب) جرم مندرج در هر کنوانسیون بین‌المللی که طرف‌ها به سبب عضویت در آن متعهد هستند که معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری را فراهم نمایند؛

پ) جرم مرتبط با تروریسم؛

ت) شروع یا تبانی جهت ارتکاب هر یک از جرایم پیش‌گفته یا مشارکت به عنوان شریک شخصی که مرتکب چنین جرایمی می‌شود یا تلاش به ارتکاب آن‌ها می‌نماید.

3. درخواست معاضدت در موارد زیر مورد موافقت قرار نخواهد گرفت:

الف) چنانچه ارائه معاضدت برای امنیت هر شخصی، خطر یا احتمالاً خطر داشته باشد اعم از این که شخص مزبور داخل یا در خارج از قلمرو طرف درخواست‌شونده باشد؛

ب) چنانچه درخواست مرتبط با تحقیق، تعقیب، یا مجازات شخص بر پایه‌ای باشد که ممکن است مطابق قوانین داخلی طرف درخواست‌شونده، مبنای امتناع از پذیرش درخواست باشد؛

4. معاضدت صرفاً بر اساس اصل رازداری بانکی یا رازداری مؤسسه مالی مشابه یا این که جرم متضمن مسائل مالی نیز تلقی می‌شود، رد نخواهد شد.

ماده 6

اجرای درخواست

1. درخواست معاضدت مطابق با قوانین طرف درخواست شونده و به گونه ای که توسط طرف درخواست کننده مقرر شده است، فوری اجرا خواهد شد.
2. طرف درخواست شونده بنا به درخواست، به طرف درخواست کننده تاریخ و محل اجرای درخواست معاضدت را اطلاع خواهد داد.
3. چنانچه اجرای درخواست با انجام تحقیقات، تعقیب یا رسیدگی حقوقی پیشگفته در قلمرو طرف درخواست شونده تداخل داشته باشد، معاضدت ممکن است از جانب طرف درخواست شونده به تعویق انداخته شود.
4. طرف درخواست شونده تصمیم خود مبنی بر عدم رعایت کلی یا جزئی درخواست معاضدت یا به تعویق انداختن اجرای آن را فوری به طرف درخواست کننده اطلاع خواهد داد و دلایل تصمیم خود را ارائه خواهد نمود.
5. طرف درخواست شونده پیش از رد درخواست معاضدت یا پیش از به تعویق انداختن اجرای درخواست، امکان ارائه معاضدت با رعایت شرایطی که طرف درخواست شونده ضروری می داند، فراهم شود را بررسی خواهد کرد. چنانچه طرف درخواست کننده معاضدت را منوط به آن شرایط بپذیرد، باید آن ها را رعایت نماید.

ماده 7

ابلاغ اسناد

1. طرف درخواست شونده درخواست ابلاغ اسنادی را که به این منظور از جانب طرف درخواست کننده به وی منتقل شده، انجام خواهد داد.
2. طرف درخواست کننده درخواست ابلاغ اسناد مربوط به پاسخ یا حضور در قلمرو طرف درخواست کننده را ظرف مدت زمان متعارفی و پیش از موعد زمان بندی شده پاسخ یا حضور، ارسال خواهد نمود.
3. طرف درخواست شونده تاییدیه ابلاغ اسناد را برای طرف درخواست کننده ارسال خواهد نمود. چنانچه ابلاغ نتواند صورت گیرد، دلایل آن به اطلاع طرف درخواست کننده خواهد رسید.

4. در مواردی که نشانی ذکر شده در درخواست حقوقی کامل یا دقیق نباشد و یا گیرنده در نشانی مزبور مشخص نباشد، طرف درخواست شونده تمام تلاش خود را طبق قوانین خود برای مشخص کردن نشانی گیرنده بکار خواهد گرفت.

5. در مواردی که اسناد به زبان طرف درخواست شونده تهیه نشده است یا همراه با ترجمه مصدق آن نباشد، اگر گیرنده، آن‌ها را قبول کند، همانگونه ارائه خواهد شد.

ماده 8

فراهم آوردن اطلاعات، اسناد، سوابق و اشیاء

1. طرف درخواست‌شونده بنا به درخواست، نسخه‌هایی از اطلاعات، اسناد و سوابق نهادها و موسسات دولتی در دسترس عموم را برای طرف درخواست‌کننده فراهم خواهد نمود.

2. طرف درخواست‌شونده می‌تواند بنا به درخواست، هرگونه اطلاعات، اسناد، سوابق و اشیائی را که در اختیار نهاد یا موسسه دولتی است، اما در دسترس عموم نیست را به همان اندازه و تحت همان شرایطی که در دسترس مقامات حقوقی و نهادهای مجری قانون خود است، برای طرف درخواست‌کننده فراهم آورد.

3. طرف درخواست‌شونده می‌تواند نسخه‌های مصدق اسناد یا سوابق را فراهم نماید، مگر آن که طرف درخواست‌کننده صراحتاً اصل آن‌ها را مطالبه نماید.

4. بنا به درخواست، اصل اسناد، سوابق یا اشیاء ارائه شده به طرف درخواست‌کننده در اسرع وقت به دولت درخواست شونده بازگردانده خواهد شد.

5. تا اندازه‌ای که به موجب قوانین طرف درخواست‌شونده منع نشده باشد، اسناد، سوابق یا اشیاء به گونه‌ای فراهم یا با گواهی‌هایی همراه خواهد شد که ممکن است توسط طرف درخواست‌کننده به منظور قابل پذیرش نمودن آن‌ها طبق قوانین طرف درخواست‌کننده تعیین شده باشد.

ماده 9

جستجو و توقیف

1. طرف درخواست‌شونده تا اندازه‌ای که قوانین آن اجازه می‌دهد، درخواست جستجو و توقیف در خصوص موضوعی کیفری را برای طرف درخواست‌کننده اجرا خواهد نمود.
2. جستجو و توقیف توسط طرف درخواست‌شونده به همان اندازه و تحت همان شرایط مذکور در قوانین آن طرف صورت خواهد گرفت.
3. مقام صلاحیت‌دار طرف درخواست‌شونده اطلاعاتی در خصوص نتایج هرگونه جستجو، محل، هویت، شرایط، درستی و استمرار مالکیت اسناد، سوابق یا اشیاء توقیف شده و اوضاع و احوال توقیف و توقیف ثانویه موارد توقیف شده که ممکن است طرف درخواست‌کننده، درخواست نموده باشد اما محدود به موارد مزبور نمی‌شود را فراهم خواهد نمود.

ماده 10

اخذ شهادت

1. طرف درخواست‌شونده تا اندازه‌ای که قوانین آن اجازه می‌دهد و بنا به درخواست نسبت به اخذ شهادت و تحصیل اسناد از شخص از جمله اشخاص در حبس یا مهیا نمودن اقلامی برای شهادت جهت انتقال به طرف درخواست‌کننده اقدام می‌نماید.
2. شخصی که قرار است از وی در طرف درخواست شونده به موجب درخواست طبق این ماده شهادت اخذ شود، در موارد زیر می‌تواند ارائه شهادت را رد کند:
 - الف) قوانین طرف درخواست‌شونده به آن شخص اجازه دهد در شرایطی مشابه در جریان رسیدگی‌های کیفری طرف درخواست‌شونده از ارائه شهادت را امتناع کند؛ یا
 - ب) قوانین طرف درخواست‌کننده به آن شخص اجازه دهد در شرایطی مشابه در جریان رسیدگی‌های کیفری طرف درخواست شونده از ارائه شهادت امتناع کند.
3. چنانچه هر شخصی در طرف درخواست‌شونده ادعا نماید که به موجب قوانین طرف درخواست‌کننده حق یا تعهدی مبنی بر رد ارائه شهادت وجود دارد، آن طرف بنا به درخواست اطلاعیه‌ای رسمی در مورد وجود آن حق برای طرف درخواست شونده فراهم خواهد نمود. این

اطلاعیه رسمی در صورت عدم وجود دلیل مخالف، دلیلی کافی برای مسائل مذکور در آن خواهد بود.

ماده 11

حضور در مرحله اجرای درخواستها

1. طرف درخواستشونده تا اندازه‌ای که قوانین داخلی آن اجازه دهد، می‌تواند حضور نماینده طرف درخواست‌کننده را جهت مشارکت در اجرای درخواست به گونه‌ای که توسط طرف درخواستشونده مشخص می‌شود، اجازه دهد.
2. تا اندازه‌ای که مغایر با قوانین داخلی طرف درخواست شونده نباشد، طرف درخواست کننده می‌تواند اوراق و اسناد را از طریق نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی ابلاغ نماید.

ماده 12

در دسترس بودن اشخاص زندانی جهت ادای شهادت یا ارائه معاضدت

1. شخص زندانی در قلمرو طرف درخواستشونده می‌تواند بنا به درخواست به طور موقت به طرف درخواست‌کننده منتقل شود تا در تحقیق یا ارائه شهادت خود مساعدت نماید، مشروط به آن که شخص مزبور رضایت داشته باشد. طرف درخواست‌کننده موافقت خواهد نمود تا هر شرطی را که از جانب طرف درخواست شونده مقرر شده است، رعایت کند.
2. طرف درخواستشونده صرفاً در صورتی شخص زندانی را به طرف درخواستشونده منتقل خواهد نمود که:
 - الف) شخص مزبور آزادانه رضایت به انتقال داشته باشد؛ و
 - ب) طرف درخواست‌کننده موافقت نماید که هر شرط مقرر توسط طرف درخواستشونده در رابطه با حفاظت یا امنیت شخص موضوع انتقال را رعایت نماید.
3. زمانی که لازم است شخص منتقل شده به موجب قوانین طرف درخواستشونده تحت حفاظت قرار گیرد، طرف درخواست‌کننده آن شخص را تحت‌الحفظ نگه خواهد داشت و در پایان اجرای درخواست، شخص زندانی را بازخواهد گرداند.
4. چنانچه حکم صادره منقضی شود یا طرف درخواستشونده به طرف درخواست‌کننده توصیه نماید که لازم نیست شخص منتقل شده بیش از این

تحت الحفظ نگه داشته شود، شخص مزبور آزاد خواهد شد و با وی به عنوان شخص حاضر در قلمرو طرف درخواستکننده به موجب درخواست حضور وی رفتار خواهد شد.

ماده 13

فراهم آوردن ادله یا معاضدت در تحقیق در طرف درخواستکننده

طرف درخواستشونده به موجب درخواست طرف درخواستکننده شخص مورد نظر را منوط به رضایت قبلی وی دعوت خواهد نمود تا در تحقیق مساعدت نموده یا به عنوان یک شاهد در جریان رسیدگی در قلمرو طرف درخواستکننده حضور به هم رساند. شخص مزبور همچنین از حمایت، تسهیلات و فوقالعاده‌هایی که مقرر خواهد گردید، مطلع خواهد شد.

ماده 14

امان نامه

1. به موجب مواد 12 و 13 این معاهده شخص حاضر در قلمرو طرف درخواستکننده در پاسخ به درخواست، برای هر فعل یا ترک فعلی که مقدم بر حرکت وی از قلمرو طرف درخواستشونده باشد، مورد تعقیب، بازداشت یا هر محدودیت دیگری از حیث آزادی شخصی در آن طرف قرار نخواهد گرفت، همچنین شخص مزبور ملزم به ارائه شهادت در هر جریان رسیدگی غیر از آنچه که مرتبط با درخواست است، نخواهد بود.

2. چنانچه شخصی که در ترک قلمرو طرف درخواستکننده آزاد است، ظرف 15 (پانزده) روز پس از دریافت اطلاعیه رسمی مبنی بر آن که حضور آن شخص دیگر لازم نیست آن سرزمین را ترک نکرده باشد، یا پس از ترک آن سرزمین به طور ارادی بازگشته باشد، اعمال بند 1 این ماده متوقف خواهد شد.

3. هر شخصی که مطابق مواد 12 و 13 این معاهده به ادای شهادت رضایت داشته باشد، به سبب شهادت خود مورد تعقیب قرار نخواهد گرفت، مگر برای شهادت دروغ یا اهانت به دادگاه.

4. هر شخصی که رضایت خود را اظهار نمی‌نماید یا از حضور در قلمرو طرف درخواستکننده خودداری نماید، مشمول هیچ اقدام اجبارکننده در قلمرو طرف درخواستشونده قرار نخواهد گرفت.

عواید و ابزارهای جرم

1. از نظر این معاهده «عواید جرم» به معنای هر گونه مالکیت نشأت گرفته یا تحصیل شده از طریق ارتکاب جرم به طور مستقیم یا غیر مستقیم است و «ابزارهای جرم» به معنای هر مال به کار رفته و انتخاب شده برای استفاده در یک جرم یا ارزش معادل چنین مالی خواهد بود.
2. طرف درخواستشونده بنا به درخواست تلاش خواهد نمود تا تعیین نماید که آیا هر گونه عواید یا ابزار جرم در قلمرو صلاحیت آن واقع شده یا نشده است و نتایج بررسی‌های خود را به طرف درخواست‌کننده اطلاع خواهد داد. همچنین طرف درخواست‌کننده اطلاعات لازم یا هر گونه مبنای دیگر که مبین وجود چنین عوایدی و یا ابزارهایی در قلمرو صلاحیت طرف درخواستشونده باشد، را ارائه خواهد نمود.
3. چنانچه به موجب بند 2 این ماده عواید و یا ابزارهای مظنون جرم یافت شوند، تا زمان تعیین تکلیف نهایی در رابطه با آن عواید و یا ابزارهای جرم از جانب دادگاه طرف درخواست‌کننده، طرف درخواست شونده اقداماتی را که به موجب قوانین داخلی آن مجاز است، اتخاذ خواهد نمود تا این عواید و یا ابزارهای مظنون جرم را جستجو، توقیف، حفظ و مصادره نماید.
4. طرف درخواستشونده در نظارت بر عواید مصادره یا ضبط شده و یا ابزارهای جرم در راستای ترتیب اثر دادن به قرار دادگاه طرف درخواست‌کننده، طبق قوانین خود اقداماتی را در مورد آن عواید و یا ابزارهای جرم اتخاذ خواهد نمود. طرف درخواستشونده تا اندازه‌ای که به موجب قوانین داخلی آن اجازه داده شده است، عواید مصادره یا ضبط شده و یا ابزارهای جرم را به طرف درخواست‌کننده انتقال خواهد داد.
5. در اجرای این ماده حقوق شخص/ اشخاص ثالث دارای حسن نیت به موجب قوانین طرف درخواستشونده محترم شمرده خواهد شد. چنانچه ادعایی از جانب شخص/ اشخاص ثالث وجود داشته باشد، طرف درخواست‌شونده به نمایندگی از منافع طرف درخواست‌کننده تا زمان تعیین تکلیف نهایی از جانب دادگاه صالح طرف درخواست‌کننده، درصدد حفظ عواید و یا ابزارهای جرم خواهد بود.

ماده 16

عبور

1. عبور فردی که حضور وی توسط طرف درخواست کننده از کشور ثالث و از طریق قلمرو طرف دیگر تقاضا گردیده است، مشروط به ارائه درخواست از مجاری تعیین شده در ماده 3 این معاهده و در چهارچوب قوانین آن طرف، اجازه داده خواهد شد. چنانچه حمل و نقل هوایی مورد استفاده قرار گیرد و هیچ گونه فرودی در قلمرو طرف مورد عبور، برنامه ریزی نشده باشد، اجازه عبور لازم نخواهد بود.

2. در صورت فرود برنامه ریزی نشده در قلمرو طرف محل عبور، آن طرف میتواند از طرف دیگر درخواست نماید همان گونه که در بند 1 این ماده مقرر شده است، برای عبور درخواست نماید. طرف مذکور تا جایی که مخالف با قوانین داخلی آن نباشد شخص را برای مدت 72 (هفتاد و دو) ساعت و تا زمان دریافت درخواست عبور در بازداشت نگه خواهد داشت.

ماده 17

محرمانه بودن

طرف درخواست شونده تضمین خواهد نمود که:

(الف) اطلاعات یا ادله تهیه شده یا منبع چنین اطلاعاتی را به موجب درخواست معاضدت به صورت محرمانه حفظ نماید؛

(ب) محتوای اسناد مؤید ادعا و هر اقدام اتخاذی را به موجب درخواست به صورت محرمانه حفظ کند؛ و

(پ) از اطلاعات یا ادله در مقابل گم شدن، دسترسی غیر مجاز، تغییر، افشا یا سوء استفاده حمایت نماید.

2. چنانچه به موجب بند 1 این ماده درخواست نتواند بدون نقض الزام محرمانه بودن اجرا شود، طرف درخواستشونده پیش از اجرای درخواست مراتب را به طرف درخواستکننده اطلاع خواهد داد و سپس طرف اخیر تعیین خواهد نمود که آیا با این وجود درخواست باید علیرغم این امر اجرا شود یا نشود.

ماده 18 محدودیت استفاده

طرف درخواستکننده متعهد خواهد شد که اطلاعات یا ادله تهیه شده برای مقاصدی غیر از آنچه که در درخواست مقرر شده را بدون رضایت طرف درخواستشونده افشا ننماید.

ماده 19 تصدیق

1. اسناد، سوابق یا اشیاء انتقال یافته از طریق مجاری پیش بینی شده در ماده 3 این معاهده، به موجب این معاهده نیازمند هیچ گونه تصدیق نخواهد بود، مگر آنچه که در بند 3 ماده 8 این معاهده مشخص شده باشد.

2. در موارد خاص اگر طرف درخواستشونده درخواست نماید که اسناد یا موادی تصدیق شوند، اسناد یا مواد مزبور به گونه‌ای که در بند 3 این ماده مقرر گردیده به نحو مقتضی تصدیق خواهند شد.

3. اسناد یا مواد در صورتی بنا به مقاصد این معاهده تصدیق می‌شوند که ظاهراً حاکی از آن باشد که توسط مقام رسمی یا صالح به موجب قوانین طرف درخواست شونده امضاء شده یا تصدیق شده باشند و به مهر رسمی آن مقام ممهور شده باشند.

ماده 20 هزینه‌ها

1. طرف درخواستشونده هزینه‌های اجرای درخواست معاضدت را متقبل خواهد شد، مگر این که طرف درخواستکننده موارد زیر را تقبل نماید:

الف) هزینه‌های مرتبط با حمل هر شخص به سرزمین یا از سرزمین طرف درخواستشونده بنا به درخواست طرف درخواستکننده و هر هزینه قابل پرداخت به آن شخص اگرچه در قلمرو طرف درخواست کننده به موجب درخواست به موجب مواد 12 و 13 این معاهده باشد؛

ب) هزینه‌ها و دستمزد کارشناسان، در قلمرو طرف درخواستشونده یا درخواستکننده؛

پ) هزینه‌های ترجمه، ترجمه همزمان و رونوشت؛ و
ت) هزینه‌های مرتبط با اخذ شهادت از جانب طرف درخواست‌شونده
برای طرف درخواست‌کننده از طریق ویدئو، ماهواره یا سایر ابزارهای
فنی.

2. چنانچه آشکار شود که اجرای درخواست مستلزم هزینه‌هایی فوق-
العاده است، طرف‌ها به منظور تعیین قیود و شرایطی که به موجب آن
معاضدت می‌تواند ارائه شود، مشورت خواهند نمود.

ماده 21

تعهدات بین‌المللی

این معاهده بر حقوق و تعهدات طرف‌ها در خصوص معاضدت حقوقی
متقابل در امور کیفری به موجب کنوانسیون‌های بین‌المللی یا سایر
ترتیباتی که طرف‌ها عضو آن هستند، تأثیری نخواهد داشت.

ماده 22

مشورت

طرف‌ها در زمانی که به طور متقابل توافق نمایند، به منظور
ترغیب موثرتر اجرای معاهده با یکدیگر مشورت خواهند نمود. همچنین
طرف‌ها می‌توانند در مورد اقدامات عملی که ممکن است جهت تسهیل
اجرای این معاهده لازم باشد، توافق نمایند.

ماده 23

حل و فصل اختلافات

هر اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده از طریق رایزنی
میان طرف‌ها حل و فصل خواهد شد.

ماده 24

اصلاح معاهده

این معاهده می‌تواند در هر زمان با رضایت متقابل طرف‌ها به
صورت کتبی اصلاح گردد. چنین اصلاحیه‌ای با همان روشی که برای لازم-
الاجرا شدن این معاهده قابل اعمال است، لازم‌الاجرا خواهد شد.

ماده 25

مقررات نهایی

1. طرف‌ها یکدیگر را از تکمیل الزامات داخلی مربوط خود جهت لازم‌الاجرا شدن این معاهده آگاه خواهند کرد. معاهده سی روز پس از دریافت آخرین اطلاعیه لازم‌الاجرا خواهد شد.

2. هر یک از طرف‌ها می‌تواند در هر زمان به وسیله ارسال یادداشتی مکتوب برای طرف دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک این معاهده را فسخ نماید. فسخ پس از 6 (شش) ماه از تاریخ دریافت یادداشت مزبور نافذ خواهد شد. فسخ این معاهده بر درخواست‌های معاضدت حقوقی که پیش از فسخ تسلیم شده باشد، تأثیری نخواهد داشت.

برای گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر از جانب دولت‌های متبوع خود به طور مقتضی مجاز هستند این معاهده را امضاء نمایند.

این معاهده شامل یک مقدمه و 25 (بیست و پنج) ماده در تهران در تاریخ 14 دسامبر 2016 میلادی مطابق با 24 آذر 1395 هجری شمسی، در دو نسخه اصلی به زبانهای اندونزیایی، فارسی و انگلیسی که تمامی آنها دارای اعتبار یکسان می‌باشند، تنظیم گردید. در صورت هر گونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی مرجع خواهد بود.

از طرف

جمهوری اسلامی ایران

Signed

مصطفی پورنجفی
وزیر دادگستری

از طرف

جمهوری اندونزی

Signed

پتنو لام. پ. مارسودی
وزیر امور خارجه



REPUBLIK INDONESIA

TREATY
BETWEEN
THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
ON
MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS

The Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran (hereinafter referred to as "the Parties");

Bearing in mind the existing friendly relations between the two countries;

Desiring to extend to each other the widest possible measures of cooperation in investigation, prosecution and adjudication of crimes as well as tracing, restraint, confiscation, or forfeiture of the proceeds and instrumentalities of crime, through mutual legal assistance in criminal matters;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1
SCOPE OF ASSISTANCE

1. The Parties shall, in accordance with this Treaty and subject to their domestic laws on the basis of mutual respect for sovereignty, equality, and mutual benefit, provide each other with the widest measures of mutual legal assistance in criminal matters.
2. For the purpose of this Treaty, mutual legal assistance in criminal matters shall mean assistance rendered by the Requested Party with respect to investigation, prosecution, adjudication, or other proceedings relating to any

offence, which at the time of request for assistance, falls within the jurisdiction of the Requesting Party.

3. Mutual legal assistance may include:
 - a. locating and identifying persons and objects;
 - b. examining objects and sites;
 - c. requesting expert advice;
 - d. serving documents, including documents seeking the attendance of persons;
 - e. providing information, documents, records, and items of evidence;
 - f. providing original or certified copies of relevant documents, records, and items of evidence;
 - g. providing objects, including lending exhibits;
 - h. recognition and enforcement of the judicial decisions;
 - i. search and seizure;
 - j. taking evidence and obtaining statements;
 - k. making detained persons available to give evidence or assist investigation, prosecution, adjudication, or other proceedings in the Requesting Party;
 - l. facilitating the appearance of witnesses or the assistance of persons in investigation;
 - m. taking measures to trace, restrain, freeze, confiscate, forfeit, and return the proceeds and/or instrumentalities of crime; and
 - n. any other form of assistance not prohibited by the laws of the Requested Party.
4. This Treaty shall also apply to any request for legal assistance relating to acts or omissions committed before its entry into force.
5. Assistance may also be granted in connection with investigation, prosecution, adjudication, or other proceedings relating to offences concerning taxation, duties customs and foreign exchange control or any other revenue matters.
6. The provisions of this Treaty shall not create any right on the part of any private person to obtain, suppress, or exclude any evidence, or impede the execution of any request for assistance.

ARTICLE 2

EXCLUSION

1. Without prejudice to the conclusion of specific treaties or arrangements, this Treaty shall not apply to:
 - a. the arrest or detention of any person with a view to the extradition of that person;
 - b. the transfer of persons in custody to serve sentences; and
 - c. the transfer of proceedings in criminal matters.
2. Nothing in this Treaty entitles a Party to undertake in the territory of another Party the exercise of jurisdiction and performance of functions that are reserved exclusively for the authorities of that other Party by its documents domestic laws.

ARTICLE 3

CENTRAL AUTHORITIES AND MANNER OF COMMUNICATION

1. For the purpose of this Treaty, the Central Authorities designated by the Parties shall communicate with each other for matters fall within the scope of this Treaty through the diplomatic channels.
2. The Central Authorities referred to in Paragraph 1 of this Article shall be the Ministry of Law and Human Rights for the Republic of Indonesia and the Ministry of Justice for the Islamic Republic of Iran.
3. Where either Party changes its designated Central Authority, it shall inform the other Party of such change through the diplomatic channels.

ARTICLE 4

CONTENTS OF REQUEST

1. In all cases, requests for assistance shall indicate:
 - a. the name of the competent authority conducting the investigation, prosecution or other proceedings to which the request relates;
 - b. the purpose of the request and the nature of the assistance sought;
 - c. a description of the nature of the criminal matter and its current status, a statement setting out summary of relevant facts and a copy of applicable

laws including the maximum penalty for the offence to which the request relates;

- d. the degree of confidentiality required and the reasons thereof;
- e. any time limit within which the request should be executed; and
- f. such other information or undertakings as may be required under the domestic laws of the Requested Party or which is otherwise necessary for the proper execution of the request.

2. In the following cases, requests for assistance shall include:

- a. in the case of requests for the taking of evidence, search and seizure, or the tracing, freezing, confiscation and forfeiture of proceeds and/or instrumentalities of crime, a statement stating information or any other ground indicating the existence of such proceeds and/or instrumentalities of crime in the jurisdiction of the Requested Party; and
- b. in the case of making detained persons available, an indication of the person or class of persons who will have custody during the transfer, the place to which the detained person is to be transferred and the probable date of that person's return.

3. If necessary, and where possible, a request for assistance shall include:

- a. the identity, nationality, and location of person(s) who is/are the subject of the investigation, prosecution or other proceedings;
- b. details of any particular procedure or requirement that the Requesting Party wishes to be followed and the reasons thereof;
- c. in the case of requests for the taking of evidence from a person, an indication as to whether sworn or affirmed statements are required and a description of the subject matter of the evidence or statement sought; and
- d. description of the documents, records, or items of evidence to be produced.

4. If the Requested Party considers that the information is not sufficient to enable the request to be executed, it may request additional information to enable the request to be dealt with.

5. A request for assistance shall be made in writing. However, in urgent circumstances or where otherwise permitted by the Requested Party, a request may be made in another form but shall be confirmed in writing promptly thereafter.

6. A request, any supporting documentation, and any communication made pursuant to this Treaty, shall be made in the language of the Requesting Party accompanied by a translation in the language of the Requested Party or English.

ARTICLE 5 REFUSAL OF ASSISTANCE

1. Request for legal assistance shall not be granted where:
- a. in the opinion of the Requested Party, the execution of the request would impair its sovereignty, security, public order, or public interest;
 - b. the request relates to an offence in respect of which the accused person had been finally acquitted or pardoned;
 - c. the request relates to a prosecution of the person in respect of an offence of which a final conviction has been passed;
 - d. the Requested Party has substantial grounds for believing that the request for mutual legal assistance has been made for the purpose of prosecuting a person on account of that person's race, religion, nationality, ethnic origin, political opinion, or that person may, for any of those reasons, be subjected to unfair treatment in judicial proceedings;
 - e. the Requesting Party fails to provide assurance that the assistance requested will not be used for the purposes other than those stated in the request without the prior consent of the Requested Party;
 - f. the Requesting Party fails to provide the assurance of the return of evidence obtained pursuant to the request for legal assistance under this Treaty;
 - g. the request relates to the investigation, prosecution or punishment of a person in respect of an act or omission that, if it had occurred in the Requested Party, would not have constituted an offence against the laws of the Requested Party except that the Requested Party may provide assistance in the absence of dual criminality if permitted by its domestic laws;
 - h. the request relates to the prosecution of a person for an offence for which the person could no longer be prosecuted by a reason of lapse of time if

- the offence had been committed within the jurisdiction of the Requested Party;
- i. the offence for which assistance is requested is a military offence, which is not an offence under the ordinary criminal law;
 - j. the request relates to an offence which is of a political nature.
2. For the purpose of this Treaty, the following shall not be considered as offence of political nature:
- a. an offence against the life or person of the Head of State or the Head of Government or member(s) of their immediate family;
 - b. an offence under any international convention to which the Parties have the obligation by virtue of becoming a state party thereto, to provide mutual legal assistance in criminal matters;
 - c. an offence related to terrorism;
 - d. an attempt or conspiracy to commit any of the foregoing offences or participation as an accomplice of a person who commits or attempts to commit such an offence.
3. Request for assistance may not be granted where:
- a. the provision of the assistance would, or would likely prejudice to the safety of any person, whether that person is within or outside the territory of the Requested Party;
 - b. the request relates to the investigation, prosecution or punishment of a person with regard to a ground that may be used as a basis for refusal as determined by the domestic laws of the Requested Party.
4. Assistance shall not be refused solely on the ground of bank secrecy or similar financial institution secrecy or that the offence is also considered to involve fiscal matters.

ARTICLE 6

EXECUTION OF REQUEST

1. Requests for assistance shall be executed promptly in accordance with the laws of the Requested Party and in the manner specified by the Requesting Party.
2. The Requested Party shall, upon request, inform the Requesting Party of the date and place of execution of the request for assistance.

3. Assistance may be postponed by the Requested Party if the execution of the request would interfere with an ongoing investigation, prosecution, or adjudication in the Requested Party.
4. The Requested Party shall promptly inform the Requesting Party of its decision not to comply in whole or in part with a request for assistance, or postpone execution, and shall give reasons for that decision.
5. Before refusing assistance or before postponing the execution of a request, the Requested Party shall consider whether assistance may be provided subject to conditions as the Requested Party deems necessary. If the Requesting Party accepts assistance subject to those conditions, it shall comply with them.

ARTICLE 7

SERVICE OF DOCUMENTS

1. The Requested Party shall carry out request for affecting service of documents which are transmitted to it for this purpose by the Requesting Party.
2. The Requesting Party shall transmit the request for service of a document pertaining to a response or appearance in the Requesting Party within a reasonable time, before the scheduled response or appearance.
3. The Requested Party shall forward to the Requesting Party proof of the service of documents. If service cannot be affected, the Requesting Party shall be so informed of the reasons.
4. In case the address mentioned in the judicial request is not complete or exact and/or the receiver is not known in that address, the Requested Party shall do its best to specify the address of the receiver, in accordance with its own laws.
5. In case the documents are not made in the language of the Requested Party or are not accompanied by a certified translation thereof, they will be submitted if the receiver so accepts them.

ARTICLE 8

PROVISION OF INFORMATION, DOCUMENTS, RECORDS, AND OBJECTS

1. The Requested Party shall, upon request, provide to the Requesting Party copies of publicly available information, documents and records of government departments and agencies.

2. The Requested Party may, upon request, provide to the Requesting Party any information, documents, records and objects in the possession of a government department or agency, but not publicly available, to the same extent and under the same conditions as they would be available to its law enforcement agencies and judicial authorities.
3. The Requested Party may provide certified true copies of documents or records, unless the Requesting Party expressly requests the originals.
4. Upon request, the original documents, records or objects provided to the Requesting Party shall be returned to the Requested Party as soon as possible.
5. In so far as not prohibited by the laws of the Requested Party, documents, records, or objects shall be provided in a form or accompanied by such certification as may be specified by the Requesting Party in order to make them admissible according to the laws of the Requesting Party.

ARTICLE 9

SEARCH AND SEIZURE

1. The Requested Party shall, to the extent its laws permit, execute a request for a search and seizure in respect of a criminal matter to the Requesting Party.
2. Search and seizure shall be conducted by the Requested Party to the same extent and under the same conditions in accordance with its laws.
3. The competent authority of the Requested Party shall provide such information as may be required by the Requesting Party concerning, but not limited to, the result of any search, the place, the identity, condition, integrity, and continuity of possession of the documents, records, or objects seized and the circumstances of the seizure, and the subsequent custody of the material seized.

ARTICLE 10

TAKING OF EVIDENCE

1. The Requested Party shall, to the extent its laws permit and upon request, take testimony and obtain documents of a person, including person in custody, or produce items for evidence for transmission to the Requesting Party.

2. Person from whom evidence is to be taken in the Requested Party pursuant to a request under this Article may refrain to give evidence where:
 - a. the laws of the Requested Party would permit that person to refrain to give evidence in similar circumstances in criminal proceedings of the Requested Party; or
 - b. the laws of the Requesting Party would permit that person to refrain to give evidence in similar circumstances in criminal proceedings of the Requested Party.
3. If any person in the Requested Party claims that there is a right or obligation to decline to give evidence under the laws of the Requesting Party, that Party shall, upon request, provide a formal notification to the Requested Party as to the existence of that right. In the absence of evidence to the contrary, such formal notification shall be sufficient evidence of the matters stated in it.

ARTICLE 11

PRESENCE AT THE EXECUTION OF REQUESTS

1. To the extent its domestic laws permit, the Requested Party may allow the presence of the representative of the Requesting Party to participate in the execution of the request in a manner specified by the Requested Party.
2. To the extent that it is not contrary to the domestic laws of the Requested Party, the Requesting Party may serve the papers and documents through its diplomatic or consular missions.

ARTICLE 12

AVAILABILITY OF PERSONS IN CUSTODY TO GIVE EVIDENCE OR PROVIDE ASSISTANCE

1. Upon request, a person in custody in the Requested Party may temporarily be transferred to the Requesting Party to assist in the investigation or to give his/her testimony, provided that the person gives his/her consent. The Requesting Party shall agree to comply with any condition as specified by the Requested Party.
2. The Requested Party shall transfer a person in custody to the Requesting Party only if:
 - a. the person freely consents to the transfer; and

- b. the Requesting Party agrees to comply with any condition specified by the Requested Party relating to the custody or security of the person to be transferred.
3. When the transferred person is required to be kept in custody under the laws of the Requested Party, the Requesting Party shall hold that person in custody and shall return the person in custody at the conclusion of the execution of the request.
4. When the sentence imposed expires, or where the Requested Party advises the Requesting Party that the transferred person is no longer required to be held in custody, that person shall be set at liberty and be treated as a person present in the Requesting Party pursuant to a request seeking that person's attendance.

ARTICLE 13
PROVIDING EVIDENCE OR ASSISTING INVESTIGATION
IN THE REQUESTING PARTY

Upon the request of the Requesting Party, the Requested Party shall invite the person, subject to his/her prior consent, to assist in the investigation or to appear as a witness in the proceedings in the Requesting Party. That person shall also be informed of protection, facilities, and allowances that would be provided.

ARTICLE 14
SAFE CONDUCT

1. Subject to Article 12 and 13 of this Treaty, a person present in the Requesting Party in response to a request shall not be prosecuted, detained, or subjected to any other restriction of personal liberty in that Party for any acts or omissions which preceded that person's departure from the Requested Party, nor shall that person be obliged to give evidence in any proceeding other than that to which the request relates.
2. Paragraph 1 of this Article shall cease to apply if a person, being free to leave the Requesting Party, has not left within 15 (fifteen) days after receiving an official notification that the person's attendance is no longer required or, having left, has voluntarily returned.

3. Any person who consents to give evidence pursuant to Articles 12 and 13 of this Treaty shall not be subject to prosecution based on his or her testimony, except for perjury or contempt of court.
4. Any person who does not give his/her consent or fails to appear in the Requesting Party shall not be subject to any coercive measure in the Requested Party.

ARTICLE 15

PROCEEDS AND INSTRUMENTALITIES OF CRIME

1. For the purpose of this Treaty, "proceeds of crime" shall mean any property derived from or obtained, directly or indirectly, through the commission of an offence; and "instrumentalities of crime" shall mean any property used in and destined for use in an offence, or the equivalent value of such property.
2. The Requested Party shall, upon request, endeavor to ascertain whether any proceeds and/or instrumentalities of crime are located within its jurisdiction and shall notify the Requesting Party of the results of its inquiries. The Requesting Party shall also provide necessary information or any other ground indicating the existence of such proceeds and/or instrumentalities of crime in the jurisdiction of the Requested Party.
3. When, pursuant to Paragraph 2 of this Article, suspected proceeds and/or instrumentalities of crime are found, the Requested Party shall take such measures as permitted by its laws to search, freeze, restrain, and confiscate those suspected proceeds and/or instrumentalities of crime, pending a final determination in respect of those proceeds and/or instrumentalities of crime by a court of the Requesting Party.
4. The Requested Party in control of the confiscated or forfeited proceeds and/or instrumentalities of crime shall, in giving effect to the order of the court of the Requesting Party, take action on those proceeds and/or instrumentalities of crime in accordance with its laws. To the extent permitted by its laws, the Requested Party shall transfer confiscated or forfeited proceeds and/or instrumentalities of crime to the Requesting Party.
5. In the application of this Article, the rights of bona fide third party/parties shall be respected under the laws of the Requested Party. Where there is a claim from third party/parties, the Requested Party shall represent the interests of the

Requesting Party in seeking to retain the proceeds and/or instrumentalities of crime until a final determination by a competent court in the Requesting Party.

ARTICLE 16

TRANSIT

1. To the extent permitted by its laws, transit of a person by a third country whose appearance has been requested by the Requesting Party through the territory of the other Party shall be authorized upon request submitted through the channel provided for in Article 3 of this Treaty. Authorization for transit shall not be required when air transport is to be used and no landing is scheduled in the territory of the Party of transit.
2. If an unscheduled landing occurs in the territory of that Party, it may require the other Party to furnish a request for transit as provided in Paragraph 1 of this Article. That Party may, in so far as not contrary to its national law, hold the person in custody for a period of 72 (seventy two) hours while waiting the request transit.

ARTICLE 17

CONFIDENTIALITY

1. The Requested Party shall ensure to:
 - a. keep information or evidence furnished or the source of such information confidential pursuant to the request for assistance;
 - b. keep the content of, supporting documents and any action taken confidential pursuant to the request; and
 - c. protect the information or evidence against loss, unauthorized access, modification, disclosure, or misuse.
2. If the request pursuant to Paragraph 1 of this Article cannot be executed without breaching the confidentiality requirement, the Requested Party shall so inform the Requesting Party prior to executing the request and the latter shall then determine whether the request should nevertheless be executed.

ARTICLE 18
LIMITATION OF USE

The Requesting Party shall undertake not disclose or use information or evidence furnished for purposes other than those stated in the request without prior consent of the Requested Party.

ARTICLE 19
AUTHENTICATION

1. Documents, records, or objects transmitted through the channel provided for in Article 3 of this Treaty pursuant to this Treaty shall not require any form of authentication, except as specified in Article 8 (3) of this Treaty.
2. Where, in a particular case, the Requested Party requests that documents or materials be authenticated, the documents or materials shall be duly authenticated in the manner provided in Paragraph 3 of this Article.
3. Documents or materials are authenticated for the purpose of this Treaty if they purport to be signed or certified by an official or competent authority under the laws of the Requested Party and to be sealed with an official seal of the authority.

ARTICLE 20
EXPENSES

1. The Requested Party shall meet the cost of executing the request for assistance, except that the Requesting Party shall bear:
 - a. the expenses associated with conveying any person to or from the territory of the Requested Party at the request of the Requesting Party, and any expenses payable to that person while in the Requesting Party pursuant to a request under Articles 12 and 13 of this Treaty;
 - b. the expenses and fees of experts either in the Requested Party or the Requesting Party;
 - c. the expenses of translation, interpretation, and transcription; and
 - d. the expenses associated with the taking of evidence from the Requested Party to the Requesting Party via video, satellite, or other technological means.

2. If it becomes apparent that the execution of the request requires expenses of an extraordinary nature, the Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the assistance can be provided.

ARTICLE 21

INTERNATIONAL OBLIGATIONS

This Treaty shall not affect the rights and obligations of the Parties concerning mutual legal assistance in criminal matters pursuant to international conventions or other arrangements to which they are a party.

ARTICLE 22

CONSULTATION

The Parties shall consult each other at time mutually agreed to by them, to promote the most effective implementation of this Treaty. Both Parties may also agree on such practical measures as may be necessary to facilitate the implementation of this Treaty.

ARTICLE 23

SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute arising from the interpretation or application of this Treaty shall be settled by consultation between the Parties.

ARTICLE 24

AMENDMENT

This Treaty may be amended at any time by mutual consent of the Parties in written form. Such an amendment shall enter into force by the same procedure as applicable for the entry into force of this Treaty.

ARTICLE 25

FINAL PROVISIONS

1. The Parties shall notify each other about the completion of their respective requirements for the entry into force of this Treaty. The Treaty shall enter into force on the thirtieth day of the receipt of the later notification.

2. Either Party may terminate this Treaty by giving a notice in writing to the other Party through the diplomatic channel at any time. Termination shall take effect after 6 (six) months of the receipt of such notice. Termination of this Treaty shall not affect the legal assistance requests submitted prior to the termination.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective governments, have signed the Treaty.

This Treaty, consisting of one preamble and 25 (twenty five) Articles, was made at Tehran on the 14th day of December in the year 2016, corresponding to the 24th day of Azar in the year 1395 in Iranian Calendar, in two originals, each in the Indonesian, Persian, and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE REPUBLIC OF INDONESIA FOR THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

Signed


RETNO L. P. MARSUDI
MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS

Signed


MOSTAFA POURMOHAMMADI
MINISTER OF JUSTICE



Salinan naskah resmi

Certified true copy

Nomor : 0064/CTC/03/2017/52

Number

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Damos Dumoli Agusman', is written over the printed name.

Dr.iur. Damos Dumoli Agusman

NIP. 19630804 198803 1 001

Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia

Secretary of Directorate General for Legal Affairs and International Treaties

Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia

Tanggal : 30 Maret 2017

Date